

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Kesejahteraan sosial dapat kita artikan sebagai terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok, atau masyarakat. Seperti tertuang dalam undang–undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dalam pasal 1 ayat 1 dapat di sebutkan bahwa “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan *material, spritual* dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial”. Tertuang pada undang–undang RI No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, masyarakat dan dunia usaha.

Kehadiran pemerintah dalam penyelenggaraan program pemberdayaan gelandangan dan pengemis mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam keberhasilan masyarakat mendapatkan kesejahteraan dimasa depan. Berdasarkan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 Menyebutkan fakir miskin dan anak telantar di perihara oleh negara dan mempunyai makna bahwa pengemis dan gelandangan di pelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Program merupakan salah satu rencana yang berisikan kebijakan dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Program yang dibuat oleh pemerintah pada umumnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Melalui program-program yang dibuat pemerintah ada salah satu

bidang membantu dan melayani masyarakat, salah satunya yaitu bidang pemberdayaan Dinas Sosial Kota Bandung. Dengan pemberdayaan tentunya akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berproduktivitas tinggi. Maka dari itu pemerintah membuat program pemberdayaan gelandangan dan pengemis untuk memudahkan masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial mendapatkan pekerjaan atau pendapatan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Diantaranya program usaha rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis, pengawasan serta pembinaan berkelanjutan, usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan dan pemulihan kemampuan.

Program usaha rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis merupakan program yang meliputi usaha-usaha penampungan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan dan penyaluran kembali kedaerah permukiman baru melalui transmigrasi maupun ketengah masyarakat, pengawasan serta pemberdayaan yang berkelanjutan, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga Negara Republik Indonesia, usaha rehabilitasi ini dilaksanakan dengan cara penampungan, seleksi, penyantunan.

Program penyantunan melibatkan masyarakat di dunia usaha, pengetasan kemiskinan ini dilaksanakan dengan cara pembinaan, dari hasil observasi di kantor Dinas Soisal Kota Bandung telah memberikan bantuan modal untuk para gelandangan dan pengemis dengan begitu gelandangan dan pengemis diharapkan bisa mendapatkan pekerjaan dengan cara-cara yang tidak melanggar norma hukum.

Program pemberian latihan, pendidikan, dan pemulihan kemampuan merupakan tindakan paling utama dalam mengatasi masalah gelandangan dan pengemis, kurangnya pendidikan membuat mereka kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, bersama dengan diberikannya pelatihan dan pendidikan mereka juga diberikan keterampilan agar nanti dapat dipergunakan untuk melakukan usaha. Kurangnya keterampilan juga menjadi faktor yang membuat mereka malas untuk memulai suatu usaha. Selain itu dengan memberikan bekal pendidikan dan keterampilan dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk dapat berbaur ketengah-tengah masyarakat. Setelah gelandangan dan pengemis di berikan pelatihan kemampuan dan pendidikan serta kemampuan untuk mandiri, mereka kemudian dipulangkan ke kampung halaman dengan tujuan dapat memulai hidup dan berusaha didaerah masing-masing.

Tidak semua masyarakat mendapatkan kesejahteraan karena masalah kemiskinan menjadi alasannya. Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan badan pusat stastistik tahun 2021 sebanyak 26,16 juta jiwa. Sedangkan untuk bandung pada tahun 2022 sebanyak 112.500 juta jiwa data ini bertambah dari tahun 2021 sampai 2022.

Tabel 1.1
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah (2021)	Jumlah (2022)
1	Anak Balita Terlantar	orang	360	354
2	Anak Terlantar	orang	6.643	5.848
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	orang	124	57
4	Anak Jalanan	orang	4.821	2.162
5	Penyandang Disabilitas Anak	orang	1.038	1.060
6	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	orang	283	151
7	Lanjut Usia Terlantar	orang	2.575	2.108
8	Penyandang Disabilitas	orang	6.289	5.069
9	Tuna Susila	orang	511	319
10	Gelandangan	orang	618	972
11	Pengemis	orang	1.289	1.762
12	Pemulung	orang	939	388
13	Kelompok Minoritas	orang	213	153
14	warga binaan	orang	282	153
15	Orang dengan HIV/Aids	orang	2.168	2.690
16	Korban penyalahgunaan Napza	orang	363	103
17	Pekerja migran bermasalah sosial	orang	13	17
18	Korban bencana alam	orang	1.823	5.939*
19	Korban bencana sosial	orang	1.176	-
20	Perempuan rawan sosial ekonomi	orang	7.537	3.487
21	Keluarga Miskin	KK	84.287	78.751
22	Keluarga bermasalah psikologis	KK	2.967	2.603
23	Keluarga berumah tidak layak huni	KK	6.395	3.606

Sumber Dinas Sosial Kota Bandung 2021, 2022

Berdasarkan laporan pada tahun 2021 sampai 2022 gelandangan dan pengemis di Kota Bandung Mengalami peningkatan dimana penanganan masyarakat miskin salah satunya terhadap gelandangan dan pengemis melalui sistem panti dan non panti yang di laksanakan pemerintah dengan memberikan pelayanan panti dengan menyediakan sarana tempat tinggal dalam satu atap yang di huni beberapa keluarga, lingkungan pondak sosial dengan mengedepankan sistem hidup bersama di dalam lingkungan sosial selayaknya kehidupan

masyarakat pada umumnya, *transit home* merupakan penanganan gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapatkan permukiman tetap yang disediakan, *transmigrasi* yaitu bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan fasilitas tempat tinggal baru dilokasi lain terutama di luar kota bandung. Permukiman merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan tempat tinggal yang permanen dilokasi tertentu.

Kemiskinan yang terjadi di kota bandung di sebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor penyebab kemiskinan tersebut ada warga yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental, pendidikan yang rendah, tidak mempunyai suatu keterampilan, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Akibat masalah ini banyak masyarakat yang mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi gelandangan dan pengemis.

Ramainya pengemis dan gelandangan ini terjadi karena tingginya angka pembangunan wilayah perkotaan, namun di desa sendiri sangat lambat atau tidak ada, hal ini menyebabkan adanya perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Kota bandung menjadi salah satu sasaran bagi penduduk di luar kota bandung untuk mencari tempat pekerjaan karena kota bandung sebagai ibu kota provinsi jawa barat dan menjadi pusat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Tingginya angka pengemis dan gelandangan yang berasal dari desa selalu kita jumpai di jalan raya, lampu lalu lintas, dan ketika malam hari mereka tertidur di sembarang tempat, seperti di depan pertokoan.

Dampak dari meningkatnya jumlah pengemis dan gelandangan muncul karena ketidakteraturan sosial yang ditandai dengan ketidaknyamanan, ketidaktertiban, serta mengganggu keindahan kota. Seperti kota Bandung lebih banyak kita jumpai di persimpangan lampu lalu lintas. Hal ini dapat mengurangi keindahan kota Bandung dan mengganggu kenyamanan para wisatawan yang ingin menikmati keindahan kota Bandung. Pengemis dan gelandangan di kota Bandung dapat ditemui di segala usia mulai dari orang dewasa, lansia, bahkan anak-anak sekalipun. Dengan berkembangnya pengemis dan gelandangan di khawatirkan akan memberi peluang kepada mereka sehingga muncul gangguan dan ketertiban, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu. Sehingga diperlukan usaha-usaha untuk penanggulangan pengemis tersebut.

Pengemis dan gelandangan erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan di kota Bandung. Di sisi lain mereka juga masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga mereka perlu diberikan perlakuan yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana sudah ada dalam undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:

“ fakir miskin dan anak telantar di pelihara oleh negara”.

Secara khusus penanganan gelandangan dan pengemis telah di atur dalam undang-undang. Sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah tentang penanggulangan pengemis dan gelandangan meliputi usaha-usaha *preventif*, *refresif*, dan *rehabilitatif*. Kota Bandung juga mengeluarkan peraturan daerah Nomor 24 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan

sosial di tunjukkan untuk penyandang kesejahteraan sosial yang salah satu sasarannya adalah gelandangan dan pengemis.

Upaya dinas sosial kota Bandung melaksanakan penanganan pencegahan, pendampingan, rehabilitasi sosial, pendidikan dan pelatihan. Pada masalah penyandang kesejahteraan sosial khususnya gelandangan dan pengemis belum sepenuhnya tuntas, dikarenakan banyak dari mereka akan kembali ke jalan. Gelandangan dan pengemis yang berasal dari kota Bandung akan di beri pelatihan atau rehabilitasi selama 3 bulan di panti rehabilitasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tetapi gelandangan dan pengemis dari luar kota Bandung di kembalikan ke tempat mereka tanpa adanya pengawasan setelah itu sehingga mereka terus menerus datang kembali ke kota Bandung untuk mengemis.

Program pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan oleh dinas sosial kota Bandung merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari dinas sosial kota Bandung. Banyaknya pengemis di kota Bandung, baik itu di jalanan-jalanan kota, tempat-tempat perbelajaan, stasiun-stasiun kereta api, terminal dan tempat-tempat lainnya di kota Bandung tentunya kurang mencerminkan visi misi yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kota Bandung yaitu unggul, nyaman dan sejahtera menuju Bandung Juara yang bermartabat.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan permasalahan pada program pemberdayaan pengemis dan gelandangan. Kendala yang dihadapi pada pemberdayaan gelandangan dan pengemis diantaranya:

1. kurangnya kesadaran diri masyarakat tentang pentingnya pendidikan sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk

mendapatkan pekerjaan yang layak dan permasalahan ini termasuk pada dimensi kecukupan.

2. kurangnya ketersediaan lapangan kerja baru menjadi penyebab permasalahan pada dimensi perataan.
3. Permasalahan lain yang dihadapi dalam hal pemberdayaan pengemis dan gelandangan yakni tidak adanya pengawasan yang berkelanjutan oleh dinas sosial kota bandung dan permasalahan ini berkaitan dengan dimensi responsivitas .
4. proses pemberdayaan gelandangan dan pengemis membutuhkan waktu untuk penanganannya, karena di waktu-waktu tertentu populasi pengemis dan gelandangan meningkat seperti yang terjadi dihari libur, hari raya keagamaan, maupun di pusat-pusat rekreasi dan perbelanjaan, sehingga pada akhirnya pelaksanaan pemberdayaan gelandangan dan pengemis hanya efektif pada awalnya saja dan tidak berkelanjutan sehingga menjadi permasalahan terkait dimensi efisiensi.

Mudahnya para pengemis untuk mencari uang tanpa perlunya pendidikan yang tinggi, menyebabkan peningkatan jumlah pengemis tiap tahunnya. Mereka hanya memerlukan belas kasihan dari masyarakat yang menjadi objek utamanya, ini tentu akan berakibat pada proses *output* pemberdayaan yang telah dilaksanakan, karena secara tidak langsung akan terbangun pola berpikir dari para pengemis dan gelandangan di kota bandung, untuk lebih memilih jalanan sebagai tempat yang mereka anggap layak untuk mencari nafkah.

Peneliti tertarik untuk meneliti terkait program ini guna mengetahui sejauh mana program pemberdayaan ini telah terlaksana. Sampai mana program ini terlaksana, yang mana tujuan program ini untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang di khususkan pada gelandangan dan pengemis, memandirikan kehidupan gelandangan dan pengemis khususnya untuk mengangkat perekonomian mereka. Evaluasi program merupakan upaya untuk mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan sehingga dapat mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan yang telah di lakukan. Dengan dilakukannya evaluasi akan diketahui capaian program ini sehingga peneliti dalam penelitian ini mengangkat judul **“Evaluasi Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Bandung”**

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas agar masalah yang di bahas lebih spesifik sehingga dapat memunculkan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka fokus penelitian yang akan di kaji yaitu Evaluasi Program Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Soisal Kota Bandung. Dari faktor fokus tersebut di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi program pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini di lakukan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi yang terdapat hubungannya dengan masalah yang akan di bahas. Adapun tujuan dari penelitian, ini untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan gelandangan dan pengemis guna mengetahui hasil yang telah dicapai dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian secara teoritis ini memberikan manfaat yang dapat memberi manfaat pengetahuan, pemikiran, dan wawasan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Khususnya mengenai ilmu yang berkaitan dengan Evaluasi Program Pemberdayaan.

2) Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan kajian praktis bagi pemerintah dan memaksimalkan program-program yang ada di dinas sosial kota bandung, khususnya dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis kota bandung, selain itu sebagai sumber informasi dan bahan acuan dalam penepatan regulasi terkait perbaikan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik bagi semua lapisan masyarakat, termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.